

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia adalah negara tetangga yang terpenting bagi Australia. Sebagai sebuah negara kepulauan yang besar dengan jumlah populasi yang besar pula, Indonesia terletak diantara Samudera India dan Samudera Pasifik. Dengan posisi geografis yang menghubungkan Australia dengan negara-negara di benua Asia, Indonesia menempati posisi strategis dalam kebijakan pertahanan dan luar negeri Australia.

Takdir demikian tidak mampu ditolak kecuali kedua bangsa mampu menciptakan suatu kemitraan yang sehat, yang dapat menjamin kesetabilan kawasan mereka. Hubungan kemitraan yang sehat memang dibangun oleh kedua negara, namun dalam pengembangannya hubungan tersebut diwarnai oleh nuansa-nuansa yang memperburuk hubungan tersebut. Perbedaan-perbedaan budaya, dan prioritas-prioritas kebijakan politik dalam dan luar negeri kedua negara yang sangat mempengaruhi ketidak sehatan hubungan di antara kedua negara tetangga tersebut.

Hubungan Australia dengan Indonesia diawali menjelang kemerdekaan Indonesia 1945. Dukungan Pemerintah Australia terhadap kemerdekaan Indonesia, yang telah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, yang paling dirasakan antara 1947-1950. Pada mulanya, Australia tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam persoalan kolonial di Indonesia, dan berusaha memberikan simpati

kepada usaha-usaha penyelesaian persoalan kemerdekaan, yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda dan para nasionalis Indonesia.

Rasa simpati tersebut pernah diungkapkan Menteri Luar Negeri Australia, Dr. Herbert Vere Evatt, pada bulan April 1943 dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, yang menyarankan agar “Hindia Belanda dan Australia dapat menjadi mitra erat dalam mengembangkan dan mendatangkan cara hidup yang lebih baik lagi bagi rakyat Indonesia”.<sup>1</sup> Segera setelah kaum nasionalis Indonesia, dibawah pimpinan Soekarno dan Muhammad Hatta, menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kaum buruh galangan kapal Australia mewujudkan dukungan dan simpati mereka dengan melarang semua kapal Belanda memasuki perairan Australia.

Hal ini disebabkan karena Belanda menggunakan Australia sebagai pelabuhan untuk menguasai kembali Republik Indonesia, yang kala itu belum terbentuk, melalui tindakan militer. Peristiwa inilah yang menyatukan hubungan kedua bangsa, serta menempatkan Australia adalah “kawan” dalam pandangan bangsa Indonesia.

Di dunia Internasional, Australia juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini merupakan wujud perhatian politik luar negeri Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Chifley, dan antusiasme yang ditunjukkan oleh menteri luar negerinya Dr. H.V. Evatt. Demikian pula peran yang dimainkan oleh simpatisan kaum nasionalis Indonesia, yang menjabat sebagai wakil tetap

---

<sup>1</sup> Critchley, op.cit, hal 13

Australia di PBB, yaitu Hakim (kemudian menjadi Sir Richard) Kirby dan wakilnya Tom Critchley. Australia selalu mengikuti perkembangan di Indonesia setelah terjadinya penandatanganan Perjanjian Linggarjati, antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Indonesia, dan diawasi oleh Komisaris Tinggi Inggris, Lord Killearn.

Pergantian pemerintahan di Australia dari Partai Buruh ALP (Australian Labor Party) kepada koalisi Partai Liberal-Country, membawa perubahan pula terhadap hubungan bilateral Australia dengan Indonesia. Pemerintahan koalisi Liberal Country di bawah PM Menzies menjalankan kebijakan laur negeri berada di bawah komando Menteri Laur Negeri Percy C. Spender. Kebijakan luar negeri Australia, yang dipengaruhi oleh situasi Perang Dingin, membawa Australia kepada sikap yang Pro pada kekuatan-kekuatan Barat. Pemerintah Australia menyatakan keinginan agar Belanda tetap menguasai Irian Barat, Padahal masalah Irian Barat (kemudian menjadi Irian Jaya) merupakan persoalan yang masih mengganjal dalam penyelesaian kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda.

Pernyataan Australia tersebut bukanlah tanpa alasan yang mendasar, karena setelah invasi Jepang ke Pulau New Guinea<sup>2</sup> menjelang PD II, masyarakat dan pemerintah Australia lebih meyakini bahwa Pulau tersebut sangat penting bagi keamanan Australia. Sebagai sama-sama bangsa kulit putih, Australia lebih mengenal bangsa Belanda yang berada dalam satu kubu bangsa barat dari pada Indonesia yang baru merdeka. Oleh karena itu Australia merasa keamanan

---

<sup>2</sup> Irian Barat dan Irian Timur

wilayahnya akan lebih terjamin bila pulau tersebut berada di bawah kekuasaan Belanda.

Dengan demikian, antara 1950-62 merupakan titik terendah dalam hubungan terendah dalam hubungan Indonesia dengan Australia. Indonesia akhirnya mengambil jalan keras dalam masalah Irian Barat, dimana kesatuan militer dikerahkan untuk menguasai Irian Barat. Sementara perjuangan diplomasi tetap dilakukan Presiden Soekarno dengan menggalang kekuatan dunia ketiga.

Antara tahun 1972-1988 hubungan Indonesia dan Australia diwarnai oleh beberapa masalah yang mengakibatkan berfuktuasinya hubungan tersebut. Persoalan utama yang paling mengganggu hubungan negara bertetangga ini adalah masalah Timor Timur. Persoalan Timor Timur diwarnai kebijakan luar negeri Australia selama jabatan kedua PM Buruh, Whitlam (1974-5), selama masa PM Koalisi Liberal- Nasional, Freaser (1975-83), dan ketika PM Buruh Hawke berkuasa sejak 1983. Sekalipun terjadi perdebatan seru di Parlemen, pemerintah Australia (baik Partai Buruh maupun Koalisi Liberal-Nasional) mempunyai pandangan sama mengenai masalah penggabungan Timor Timur kewilayah Indonesia. Bagi pemerintahan Buruh maupun Koalisi Liberal-Nasional, prioritas tertinggi adalah memelihara hubungan persahabatan dengan Indonesia, dan tidak menghendaki adanya isu-siu yang dapat mengganggu hubungan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Coldrey, Op.cit., hlm 158

Dari beberapa penjelasan dan ulasan diatas, terlihat bahwa dinamika hubungna bilateral antra negara Indonesia dengan Australia sangat abstrak dan labil, kebijakan luar negeri antar kedua negara negarapun kerap berubah seiring dengan bergantinya kepala negara masing-masing negara.

Kemenangan Partai Buruh Australia (ALP) pada tahun 1991, mengangkat Paul Keating sebagai Perdana Menteri Australia. Dimasa pemerintahan Keating, yang menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Keating Adalah keterlibatan lebih mendalam dengan negara-negra tetangga di Asia terutama Indonesia, karena menurut Keating Indonesia sangat penting bagi Integrasi politik dan ekonomi Australia di kawasan Asia. Tidak hanya itu, Keating juga menyerukan agar Amerika tidak menekan Asia, salah satunya Indonesia seputar isu pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Hubungan Indonesia dengan Australia semasa Keating juga digambarkan seperti pada masa tahun 1945-1950 saat Australia turut mendukung langkah kemerdekaan Indonesia. "Hubungan bilateral Indonesia-Australia tampaknya memang lebih serasi saat Partai Buruh berkuasa" kata S Wiryono, mantan Dubes RI untuk Australia, dalam pertemuan kelompok Ahli Indonesia-Australia di Bandung.

Bagi Keating Indonesia sama pentingnya dengan mitra bilateral Australia yang lain seperti Jepang dan Amerika. Inisiatif besar dalam kepentingan strategis Australia terhadap Indonesia diwujudkan dalam latihan militer bersama pada tahun 1995 yang di ikuti penandatanganan Perjanjian Penanganan Keamanan

antara Indonesia dan Australia 18 Desember 1995. Terlepas dari kepentingan domestik yang melatar belakangi pilihan kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia, hubungan kedua negara memang mesra tanpa banyak gangguan yang berarti.

Setelah kekalahan Keating pada pemilu tahun 1996, masa pemerintahan Keating di gantikan oleh John Howard dari koalisi Partai Liberal. Dimasa pemerintahan Howard dinamika hubungan Indonesia-Australia lebih diwarnai rasa saling curiga dan curam-curam pemisah perbedaan perpolitikan kedua negara mulai tampak terlebih lagi setelah Australia nyata mendukung kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1999.

Kini ALP (Australia Labor Party) kembali berkuasa dibawah pimpinan Perdana Menteri Kevin Rudd, sebagai sesama pengikut Ideologi ALP Rudd diharapkan bisa mengulang masa-masa mesra hubungan Bilateral Indonesia-Australia seperti saat Keating berkuasa.

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Terkait dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, pokok permasalahan yang dapat diambil yaitu :

Bagaimana upaya rezim pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd dalam memperbaiki dan membina hubungan bilateral dengan Indonesia?

### C. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi penulis mencoba untuk menguraikan dengan definisi beberapa teori diantaranya yaitu,

#### 1. *Teori Persepsi*

*Perilaku suatu negara tergantung pada cara pandang negara itu terhadap suatu obyek atau situasi. Persepsi ini selain mengandung nilai-nilai yang menjadi standar seseorang dalam mengartikan situasi yang dihadapinya, apakah situasi itu baik atau buruk, merupakan ancaman atau bukan dan lain-lain, juga mengandung keyakinan tentang suatu hal yang dianggap benar, meskipun kebenaran tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.<sup>4</sup>*

Menurut Kenneth Boulding, sebenarnya kita bereaksi terhadap citra kita tentang dunia. Sedangkan dunia nyata dan persepsi kita tentang dunia nyata itu mungkin berbeda.

*Kita harus mengakui bahwa orang-orang yang menentukan kebijaksanaan dan tindakan negara-negara tidak melakukan tindakan terhadap fakta-fakta situasi yang objektif, tetapi citra*

---

<sup>4</sup> R. Holsti, *Internasional Politik A Frame Work For Analysis* (Thrid Edition Pretice Hall, Mc Engel Wood Cliffs), New Jersey, 1997, Hal. 367-370

*mereka tentang situasi itu. Yang menentukan perilaku kita adalah persepsi kita tentang dunia, bukan kenyataan dunia.*<sup>5</sup>

Walaupun mungkin salah persepsi itu memainkan peran dalam menentukan perilaku suatu negara. Thomas Franck dan Edward Weisband, yang menekankan pentingnya citra juga berpendapat bahwa cara dua negara saling melihat satu sama lain sering menentukan cara mereka berinteraksi. Suatu pola kerjasama yang sistematis tidak mungkin berkembang diantara negara-negara yang masing-masing menganggap lawan sebagai jahat, agresif dan tidak bermoral.<sup>6</sup>

Jadi orang melakukan tindakan berdasar apa yang mereka “ketahui”. Tanggapan seseorang pada suatu situasi tergantung kepada bagaimana ia mengidentifikasi situasi itu. Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan dalam cara orang memandang “kenyataan”.

Disamping itu, suatu hal yang terkait erat dengan persepsi adalah citra yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok orang. Citra ini merupakan produk pesan-pesan yang diterima di masa lampau akan tetapi bukan sekedar akumulasi pesan biasa, melainkan seperangkat kapital informasi yang dapat berstruktur.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Mochtar Mas' oed, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional*, (Pau Study Sosial UGM), Yogyakarta 1988, Hal. 19-20

<sup>6</sup> Op. cit, hal 19-20

<sup>7</sup> Herbert Kelman, dikutip dari James E. Dougherty dan Robert P Flazgarft Jr, *Contending Theories of International*, J.B Lipincott Company, New York Hal. 224



Hubungan antara citra persepsi dan perilaku dapat digambarkan sebagai berikut: *pertama*, bahwa ada semacam stimulasi yang muncul dari sebuah situasi atau keadaan. *Kedua*, muncul upaya mempersepsikan stimulasi tadi, ini adalah proses menyeleksi, menata, dan menilai informasi yang masuk. Dan *ketiga*, muncul upaya menafsirkan stimulasi yang telah dipersepsi tersebut sehingga muncul sebuah perilaku tertentu sebagai reaksi terhadap stimulasi tadi, jika citra yang dipegangnya negatif, begitu pula sebaliknya. Namun ini tidak berarti konstan, perubahan suatu citra atau persepsi mungkin saja terjadi karena pada dasarnya citra itu bersifat dinamis, tidak permanen.<sup>8</sup>

Teori persepsi membedakan tiga komponen persepsi, yaitu nilai, keyakinan dan pengetahuan (fakta). Nilai adalah preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu dibanding realitas lainnya. Nilai memberikan harga relatif kepada objek dan kondisi. Keyakinan adalah benar, terbukti atau telah diketahui. Keyakinan sering didasarkan pada penerimaan informasi yang sebelumnya dari lingkungan, meskipun hal itu tidak sama dengan data sendiri. Ini adalah suatu pernyataan analitis yang menghubungkan satuan-satuan data kedalam suatu pola “yang teruji”. Sedangkan pengetahuan (tahu atau fakta yang ada) bersumber dari data atau informasi yang diterima dari lingkungan. Pengetahuan adalah unsur kunci dalam pembentukan dan perubahan sistem perseptual. Konsep perubahan

---

<sup>8</sup> Walter S. Jones and Steve J. Rosen, *The Logic of International*, alih bahasa, Budiono, Gramedia, Jakarta, 1992, hal 244

persepsi nasional mengacu pada pengetahuan baru merombak keyakinan dan nilai, dengan cara mengenalkan informasi baru.<sup>9</sup>

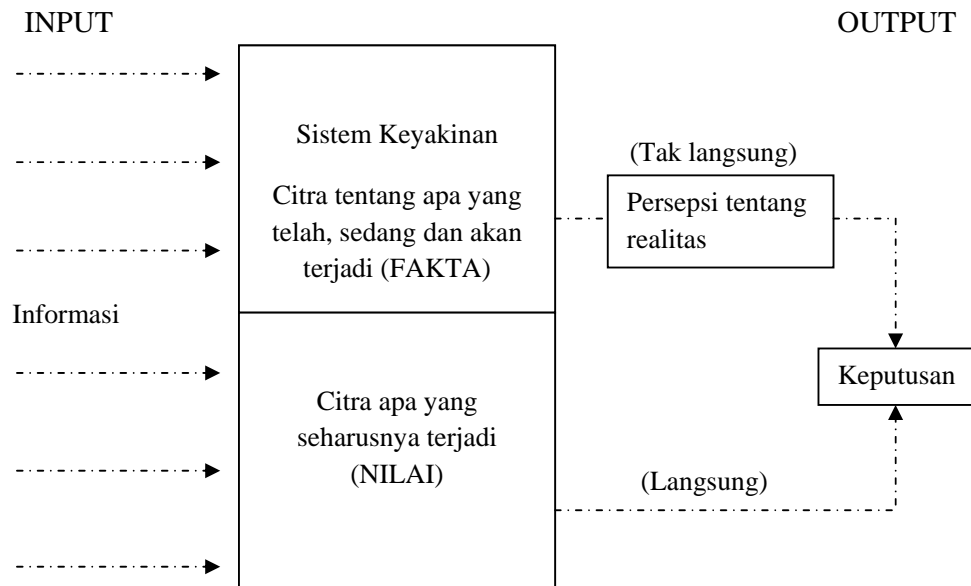
Persepsi tersebut dibangun berdasarkan rangkaian data dan analisa-analisa sejarah (historis), yang kemudian ditunjang oleh fakta. Fakta didefenisikan secara subjektif dan pada dasarnya merupakan suatu fenomena persepsi. Persepsi tidak dapat dibenarkan bila berlawanan dengan fakta, jika fakta itu sendiri merupakan persepsi. Hal ini selanjutnya tidak memerlukan pembenaran lebih jauh, karena para pembuat keputusan menganggap pihak lainnya sebagai tidak jujur.

Para pembuat keputusan dipengaruhi oleh berbagai proses psikologi yang mempengaruhi persepsi itu, misalnya untuk merasionalisasikan tindakan, untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan, dan lain sebagainya. Bruce Ruset dan Harvey Starr menjelaskan bagaimana citra seseorang mempengaruhi persepsinya tentang dunia sekitarnya melalui proses sebagai berikut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wolter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional*, Gramedia, Jakarta, 1992, hal. 276-277

<sup>10</sup> Ole R. Holsti, *The belief system and National Images : A Case Study*, Dikutip Dalam Bruce Russet dan Harvey Starr, *World Politics*, (Freeman, New York, 1985), hal. 304.



Gambar I.1

*Hubungan antara sistem keyakinan dengan pembuat keputusan politik luar negeri.*

Pada awalnya nilai dan keyakinan seseorang, membantunya menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan apa stimulusnya, yang dilihat dan diperhatikan. Kemudian berdasarkan sikap dan citra yang telah diyakini selama ini stimulus itu diinterpretasikan. Citra berfungsi sebagai saringan. Setiap orang, hanya memperhatikan sebagian saja dari dunia di sekitarnya, dan setiap orang memiliki serangkaian mitra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk. Persepsi yang didasarkan pada persepsi yang sudah ada sebelumnya adalah proses seleksi. Sistem keyakinan adalah sekumpulan keyakinan, citra, atau model tentang dunia yang diyakini seseorang.

Menurut Holsti, sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang seseorang. Citra-citra itu meliputi realitas masa lalu, masa kini, dan realitas yang diharapkan di masa depan, dan preferensi nilai tentang apa yang seharusnya terjadi.<sup>11</sup> Demikianlah teori persepsi ini telah diuraikan melalui beberapa sudut pandang para pakar.

Jika teori ini diaplikasikan terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan Australia, pandangan Holsti tentang keyakinan tersebut ternyata dimiliki oleh kedua Negara baik Indonesia maupun Australia. Hal ini dilatar belakangi oleh dinamika hubungan kedua negara yang mengalami pasang surut dimasa-masa sebelumnya. Salah satu contohnya yaitu dukungan Australia terhadap kemerdekaan Timor-timur pada masa pemerintahan Perdana Menteri Howard, sebaliknya tragedi Bom Bali yang menewaskan sejumlah warga Australia tentunya juga akan menjadi acuan dan pertimbangan bagi Australia terhadap Indonesia.

## 2. *Teori Diplomasi*

Diplomasi yang sedang digambarkan sebagai “*the politics of international relations*” telah berkembang terus menerus seiring dengan sejarah sebagai suatu metode yang berhubungan dengan dunia yang keras. Di dalam dunia yang terdiri dari sistem kenegaraan yang kompetitif, negara-negara yang bersaing satu sama lain untuk bertahan hidup, memajukan kepentingan nasional mereka dan

---

<sup>11</sup> Oleh R. Holsti, dikutip dalam Mochtar Mas' oed, Op.cit, hal. 21-22.

menguasai negara lain. Persaingan terus berlangsung antara negara-negara dalam mengejar tujuannya. Bahkan tidak jarang suatu negara mengejar tujuan yang lebih dari satu. Di akui secara laus bahwa salah satu fungsi utama diplomasi adalah negosiasi. Diplomasi mempunyai ruang lingkup menyesuaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan negara-negara melalui negosiasi yang sukses.<sup>12</sup>

Menurut The Oxford English Dictionary yaitu :

*“menejemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini di selaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil bisnis atau seni para diplomat”*<sup>13</sup>

Sedangkan menurut the Chamber’s Twentieth Century Dictionary diplomasi adalah

*“the art of negotiation, especially of treaties between states, political skill”.*

(seni berunding, khususnya tentang perjanjian diantara Negara negara, keahlian politik)<sup>14</sup>

Tujuan utama dari diplomasi adalah untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri, sedangkan tujuan vital yang lain antara lain: memajukan ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial, perlindungan

---

<sup>12</sup> S. L. Roy, Diplomasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995 hlm, 17

<sup>13</sup> Ibid,

<sup>14</sup> S. L. Roy, Op cit, hlm 2

warga negara di negara lain mengembangkan budaya dan teknologi, peningkatan prestise nasional, memperoleh sahabat dengan negara lain<sup>15</sup>, dan lain sebagainya. Hal ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dengan negara sahabat, memelihara hubungan erat dengan negara-negara yang sehaluan. Saat ini politik luar negeri merupakan kepanjangan dari kondisi yang terjadi di dalam negeri, sepintar apa pun para diplomat melakukan diplomasi tanpa didukung kondisi yang kondusif dari dalam negeri, niscaya tidak akan berarti banyak. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan hubungan yang harmonis antara kedua negara perlu diadakan rundingan kesepakatan yang tentunya akan memberikan keuntungan bagi masing-masing negara.

#### **D. HIPOTESA**

Dari permasalahan yang ada dan dengan didukung oleh kerangka pemikiran yang telah ditetapkan maka penelitian ini mengambil hipotesa sebagai berikut :

1. Sejak awal kenaikannya Perdana Menteri Kevin Rudd berperan aktif dalam upaya pemulihan dan perbaikan citra buruk Indonesia di mata warga Australia.
2. Dalam pemerintahannya Perdana menteri Kevin Rudd ingin menjadikan Indonesia sebagai negara sahabat yang di prioritaskan di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam hubungan keamanan wilayah (Border Security)

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 5

kerjasama antar lembaga, riset, kepemudaan, ekonomi, dan antar media massa kedua negara.

3. Australia juga akan mengadakan kerjasama industri dan pertahanan dengan Indonesia, juga turut andil bersama Indonesia dalam menangani perubahan iklim (global warming).

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk memberikan Deskripsi mengenai kebijakan yang di Ambil Pemerintah Australia dalam menjaga hubungan bilateral Indonesia – Australia, terutama setelah terpilihnya Kevin Rudd dari Partai Buruh sebagai Perdana Menteri ke 26 bagi pemerintahan Australia.
2. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi langkah-langkah apa sajakah yang dilakukan kedua negara dalam menjaga dan mempertahankan hubungan bilateral Indonesia – Australia.
3. Merupakan usaha perluasan dan pendalaman pengetahuan Penulis terhadap metodologi ilmu Hubungan Internasional dan teori-teori politik Internasional pada umumnya dan pada khususnya yang berkaitan dengan hubungan Indonesia – Australia.
4. Untuk melengkapi tugas akhir Penulis dan sekaligus sebagai penerapan teori-teori yang pernah diterima penulis pada masa aktif dalam perkuliahan.
5. Ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademis yang dibebankan kepada penulis pada jenjang studi Strata I di Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Hubungan Internasional  
tahun Ajaran 2007-2008.

#### **F. METODE PENGUMPULAN DATA**

Dalam melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat studi kepustakaan (*library research*). Untuk itu penulis mengambil referensi berupa buku-buku literature, bulletin-buletin, jurnal-jurnal, kliping dari Koran dan majalah serta informasi-informasi yang di dapat diweb-site di internet dan referensi-referensi lain, yang kesemuanya dianggap relevan untuk fokus studi masalah ini.

#### **G. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian sudah semestinya ditetapkan suatu jangkauan penelitian atau batasan penelitian dengan tujuan agar penelitian tersebut tetap dapat mengarah pada sasaran masalah yang dipertanyakan dalam sebuah periode masalah tertentu. Dalam penelitian ini, penulis memulai penulisannya sejak terpilihnya Perdana Menteri Kevin Rudd sebagai Perdana menteri ke 26 Australia pada tahun 2007. Alasan yang dikemukakan penulis karena di masa-masa pemerintahan Australia dibawah kepemimpinan Partai Buruh, hubungan bilateral Indonesia dengan Australia cenderung berkesan lebih baik dari pada partai-partai lainnya.

Akan tetapi tahun-tahun sebelum terpilihnya Kevin Rudd sebagai perdana menteri Australia tetap menjadi perhatian selama masih menyangkut kepentingan



analisis dalam menyusun penelitian ini. Maka untuk memberikan gambaran dan dasar-dasar yang lebih jelas, maka perlu kiranya bagi penulis untuk memberikan gambaran singkat mengenai dinamika hubungan bilateral Indonesia – Australia sebelum terpilihnya Kevin Rudd sebagai perdana menteri Australia. Terutama di masa pemerintahan perdana menteri Paul Keating dan John Howard.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Bab I : Merupakan gambaran umum mengenai maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi. Dalam bab ini, memuat Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Ruang Lingkup Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Merupakan bab yang akan menjelaskan Hubungan Bilateral Indonesia – Australia sebelum terpilihnya Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri Australia.

Bab III : Menceritakan mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan Perdana Menteri Kevin Rudd terhadap hubungan Indonesia – Australia.

Bab IV : Adalah bab terakhir berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.